

Tabel 2.1. Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan .</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi</p> <p>Tujuan Kegiatan : - Penyusunan Perubahan RPJM Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 - Penyusunan RKP Prov. Sulsel Tahun 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 	<p>Akses : -</p> <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam penyusunan RKPD keseimbangan antara pegawai laki laki dan perempuan masih kurang. <p>Kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum adanya ketegasan dalam pemilahan peserta perempuan dan laki laki Masih Kurangnya komitmen dari peserta kabupaten/ 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan panitia pelaksana tentang keadilan PUG masih terbatas. Undangan bagi peserta musrebang RKPD belum mempertimbangkan proporsi yg seimbang antara peserta perempuan dan laki laki Undangan peserta ditentukan oleh panitia 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor budaya ya belum perc terhadap penting pengetahuan tent proses perencanaan dalam memb Dokumen RKPD un perempuan. Faktor dukung keluarga ya menyebabkan kurangnya minat ka perempuan mengik proses perencana dokumen RKPD. Budaya masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan sendiri 	<p>Pelaksanaan musrebang RKPD dengan peserta yang berimbang antara perempuan dan laki laki</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Panduan Musrebang Responsif Gender Rapat Koordinasi Internal Persiapan Tim Musrebang RKPD Mempersiapkan undangan, format Apsen Terpilah Peserta Musrebang Responsif Gender Pelaksanaan Kegiatan, Musrebang Pembekalan 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 10 (sepuluh) Komponen Keterwakilan Masyarakat pada Musrebang Tahun 2021 Persentase kehadiran Peserta Laki-laki : 60% perempuan :40% 	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peserta (Perempuan dan laki-laki) yang mengikuti Kegiatan Musrebang Provinsi <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Sumber Daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan Keterampilan perempuan dalam mengakses informasi dalam

10 (Sepuluh)
Komponen
Masyarakat tersebut
adalah :

1. Keterwakilan
Pengusaha;
2. Keterwakilan
Akademisi;
3. Keterwakilan
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
(LSM);
4. Keterwakilan
Kelompok
Perempuan dan
Kelompok Usia
5. Keterwakilan
Organisasi
Masyarakat
(Ormas) yaitu
Perempuan,
Dsabilitas, Anak ,
lansia, Isu
spesifik
6. Keterwakilan
Organisasi
Keagamaan;
7. Keterwakilan
Organisasi
Profesi;
8. Keterwakilan
Tokoh

daerah

- Pergub. Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengarus Utamaan Gender
- Pada Tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) Komponen Keterwakilan Masyarakat pada Musrenbang Tahun 2021
- Pada Tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) data Komponen Keterwakilan Masyarakat Musrenbang Tahun 2021.

	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD,RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. • Permendagri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah • Perda nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan 	<p>kota</p> <p><u>Manfaat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dirasakan oleh peserta perempuan Masih lebih rendah dibanding dengan laki laki 				<p>dalam kegiatan Musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi tentang Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Musrenbang 	<p>menyusun dokumen perencanaan</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Perempuan :40%

- Usulan cakupan Musrembang tahun 2021 jumlah kurang lebih 500 orang peserta

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	: (BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan)
TAHUN ANGGARAN	: (TAHUN 2021)
PROGRAM	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
KODE PROGRAM	(5.01.02)
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan .
KODE PROGRAM	(5.01.02.1.01)
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
KODE KEGIATAN	(5.01.02.1.01.06)
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD,RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. - Pada Tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) Komponen Keterwakilan Masyarakat pada MUSRENBANG Tahun2021 <p>Keterwakilan masyarakat pada MUSRENBANG Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterwakilan Pengusaha; 2. Keterwakilan Akademisi; 3. Keterwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 4. Keterwakilan Kelompok Perempuan dan Kelompok Usia 5. Keterwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) yaitu Perempuan, Distabilitas, Anak , lansia, Isu spesifik 6. Keterwakilan Organisasi Keagamaan; 7. Keterwakilan Organisasi Profesi; 8. Keterwakilan Tokoh Masyarakat; 9. Keterwakilan Lembaga Donor. 10. Forum Anak <p>Persentase kehadiran Peserta Laki-laki : 60% Perempuan :40%</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan bagi Perempuan untuk mengikuti Forum Perencanaan masih kurang - Kendaraan dinas yang digunakan oleh perempuan untuk operasional masih kurang <p>Partisipasi : Dalam penyusunan RRPD keseimbangan antara pegawai laki laki dan perempuan masih kurang.</p> <p>Kontrol :</p> <p>Sumber Daya Perempuan masih kurang dalam Level pengambilan kebijakan , yang mana berdampak dokumen dokumen perencanaan</p> <p>Manfaat : Masih kurangnya jumlah perempuan yang dilibatkan dalam proses Perencanaan .</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan OPD tentang keadilan gender masih terbatas. - Tidak adanya monitoring secara berkala dari OPD untuk peningkatan kualitas peserta musrenbang Provinsi.

	<p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor budaya yang belum percaya terhadap pentingnya pengetahuan tentang proses perencanaan dalam membuat Dokumen RKPD untuk perempuan. - Faktor dukungan keluarga yang menyebabkan kurangnya minat kaum perempuan mengikuti proses perencanaan dokumen RKPD. - Budaya masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan sendiri 		
CAPAIAN PROGRAM	<p>Tolok Ukur Peningkatan cakupan usulan Musrenbang yang mengakomodir yang responsif gender dan inklusif</p>		
	<p>Indikator dan Target Kinerja Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan usulan Musrenbang yang responsif gender - Jumlah Peserta (Perempuan dan laki-laki) yang mengikuti Kegiatan Musrenbang Provinsi <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Sumber Daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan - Kemampuan perempuan dalam mengakses informasi dalam menyusun dokumen perencanaan 		
RENCANA AKSI	Aktifitas 1	Rapat Koordinasi Internal Persiapan Tim Penyusun Musrenbang RKPD	
		Tujuan	Mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang RKPD
		Masukan	SDM
	Aktifitas 2	Pelaksanaan Kegiatan, membuat absen terpilah untuk peserta Musrenbang	
		Tujuan	Melihat keterwakilan suara perempuan dalam proses perencanaan
		Masukan	SDM
	Aktifitas 3	Monitoring dan Evaluasi tentang Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan	
		Tujuan	Memantau sejauhmana usulan Provinsi Sulawesi Selatan diperhatikan pada tingkatan pemerintah pusat
		Masukan	SDM
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp. 2.361.037.324,-		

Makassar, 2021
Plt. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel


Ir. Andi Darmawan Bintang, MDevPlg
Pangkat.: Pembina Utama Madya
NIP. 19670427 199303 1 015

	<p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor budaya yang belum percaya terhadap pentingnya pengetahuan tentang proses perencanaan dalam membuat Dokumen RKPd untuk perempuan. - Faktor dukungan keluarga yang menyebabkan kurangnya minat kaum perempuan mengikuti proses perencanaan dokumen RKPd. - Budaya masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan sendiri 		
CAPAIAN PROGRAM	<p>Tolok Ukur Peningkatan cakupan usulan Musrenbang yang terakomodir yang responsif gender dan inklusif</p>		
	<p>Indikator dan Target Kinerja Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan usulan Musrenbang yang responsif gender - Jumlah Peserta (Perempuan dan laki-laki) yang mengikuti Kegiatan Musrenbang Provinsi <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Sumber Daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan - Keterampilan perempuan dalam mengakses informasi dalam menyusun dokumen perencanaan 		
RENCANA AKSI	Aktifitas 1	Rapat Koordinasi Internal Persiapan Tim Penyusun Musrenbang RKPd	
		Tujuan	Memperiapkan pelaksanaan Musrenbang RKPd
		Masukan	SDM
	Aktifitas 2	Pelaksanaan Kegiatan, membuat absen terpilah untuk peserta Musrenbang	
		Tujuan	Melihat keterwakilan suara perempuan dalam proses perencanaan
		Masukan	SDM
	Aktifitas 3	Monitoring dan Evaluasi tentang Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan	
		Tujuan	Memantau sejauhmana usulan Provinsi Sulawesi Selatan diperhatikan pada tingkatan pemerintah pusat
		Masukan	SDM
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp. 2.361.037.324,-		

Makassar, 2021
 Plt. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel


 Ir. Andi Darmawati Bintang, MDevPlg
 Pangkat.: Pembina Utama Madya
 NIP. 19670427 199303 1 015

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TOR

SKPD	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulawesi Selatan
Program	:	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tujuan Program	:	Peningkatan cakupan usulan Musrenbang yang terakomodir yang responsif gender dan inklusif.
Kegiatan	:	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Anggaran Sub kegiatan	:	Rp. 2.361.037.324,-
Volume	:	Volume pelaksanaan kegiatan (1 Kali)

Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD,RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

2. Gambaran Umum

Penyusunan dokumen RKPD 2021 adalah memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan daerah provinsi sulawesi selatan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan

A. Penerima Manfaat

1. Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan
2. Termanfaatkannya RKPD sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS pokok dan perubahan.)

B. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan musrembang RKPD dan melakukan penyusunan anggaran, Rancangan akhir RKPD Provinsi sulawesi selatan tahun 2021 serta pembinaan ke kabupaten / kota serta konsultasidan koordinasi sebelum penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir pada kementerian dan instansi terkait.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

- Membuat Panduan Musrembang Responsif Gender
- Rapat Koordinasi Internal Persiapan Tim Musrenbang RKPD
- Mempersiapkan undangan, format Apsen Terpilah Peserta Musrembang Responsif Gender
- Pelaksanaan Kegiatan, Musrenbang Kabupaten
- Monitoring dan evaluasi tentang Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Musrembang

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan (Diambil dari Rencana Aksi GAP langkah 7 atau RA pada Kolom GBS)	Tahun 2021											
		Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Membuat Panduan Musrenbang Responsif Gender	x											
2.	Rapat Koordinasi Internal Persiapan Tim Musrenbang RKPD	x	x										
3.	Mempersiapkan undangan, format Apsen Terpilah Peserta Musrenbang Responsif Gender	x	x										
4.	Pelaksanaan Kegiatan, Musrenbang			x									
5.	Monitoring dan evaluasi tentang Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Musrenbang				x								

C. Waktu Pencapaian Keluaran

Tuliskan waktu Capaian Keluaran pada bulan Maret 2021

D. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Kegiatan , Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Provinsi Sulawesi Selatan akan dibebankan pada anggaran DPA-PD Tahun 2021 Sebesar Rp 2.361.037.324,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Makassar , 2021
Plt. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel


Ir. Andi Darmawan Bintang, MDevPlg
Pangkat.: Pembina Utama Madya
NIP. 19670427 199303 1 015



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Formulir
RKA-SKPD
2.2.1**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terdapat 10 (sepuluh) Komponen Keterwakilan Masyarakat pada Musrembang Tahun 2021 Persentase kehadiran Peserta	100%
Masukan	Rp 2.361.037.324,-	Rp 2.361.037.324,-
Keluaran	Indikator Kinerja Output - Cakupan usulan Musrembang yang responsif gender - Jumlah Peserta (Perempuan dan laki-laki) yang mengikuti Kegiatan Musrenbang Provinsi	Laki-laki = 60 Orang Perempuan = 40 orang
Hasil	Indikator Outcome - Meningkatnya Sumber Daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	Terdapat 10 (sepuluh) Komponen Keterwakilan Masyarakat pada Musrembang Tahun 2021	